

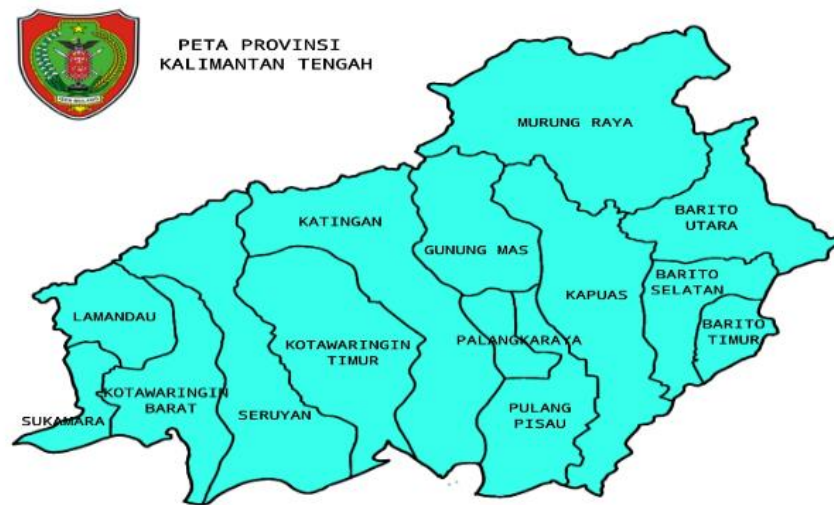
BAB II

KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI KALIMANTAN TENGAH

2.1. Karakteristik Wilayah dan Struktur Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan dan memiliki wilayah administratif terluas di antara seluruh provinsi di pulau tersebut, sekaligus terluas kedua di Indonesia. Letak geografis ini menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi strategis sebagai wilayah penghubung antara kawasan pesisir selatan Kalimantan dengan kawasan pedalaman di bagian tengah dan utara pulau (PPID Provinsi Kalimantan Tengah, 2023)

Secara administratif, wilayah daratan yang luas tersebut dibagi ke dalam 13 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, dengan Kota Palangka Raya yang sekaligus berfungsi sebagai ibu kota provinsi. Karakteristik topografi Kalimantan Tengah sangat unik karena membelah oleh 11 sungai besar dan ratusan anak sungai yang sejak lama menjadi urat nadi transportasi, sosial, dan ekonomi masyarakat pedalaman. Wilayah ini secara umum terbagi menjadi tiga zona ekosistem utama, yakni kawasan pesisir pantai dan rawa di bagian selatan yang berhadapan dengan Laut Jawa, kawasan dataran rendah yang subur di bagian tengah, serta kawasan dataran tinggi dan perbukitan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan pegunungan Schwaner dan Muller (PPID Provinsi Kalimantan Tengah, 2023).



Gambar 1 : Peta Provinsi Kalimantan Tengah

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai sekitar 153.443,9 kilometer persegi. Wilayah ini terbagi secara administratif ke dalam tiga belas kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai ibu kota provinsi. Karakter wilayah yang sangat luas dengan pembagian administratif yang relatif banyak membentuk keragaman kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antardaerah. Beberapa kabupaten memiliki bentang wilayah geografis yang sangat besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang renggang, sementara wilayah perkotaan seperti Kota Palangka Raya memiliki konsentrasi aktivitas yang lebih terpusat (BPS Kalimantan Tengah, 2026).

Wilayah bagian tengah hingga utara memiliki karakter topografi yang lebih bervariasi, didominasi oleh kawasan perbukitan hingga pegunungan Schwaner dan Muller. Daerah-daerah pedalaman ini umumnya memiliki tingkat aksesibilitas dan

keterjangkauan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau kawasan pesisir pantai selatan. Kondisi geografis tersebut berpengaruh signifikan terhadap distribusi pembangunan infrastruktur dasar, akses pelayanan publik, serta pola mobilitas harian masyarakat. Wilayah pedalaman hulu cenderung memiliki jarak antarpusat permukiman yang berjauhan dengan moda transportasi yang terbatas, sehingga dinamika sosial ekonomi berkembang dengan ritme yang berbeda dibandingkan wilayah hilir (PPID Provinsi Kalimantan Tengah, 2023)

Kondisi keterbatasan infrastruktur penghubung dan luasnya bentang spasial inilah yang menjadi tantangan nyata saat kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diimplementasikan di tingkat lokal. Sebagai catatan lini masa kebijakan, program MBG di Kalimantan Tengah pertama kali diluncurkan secara resmi pada tanggal 13 Januari, yang menysar 16 sekolah di wilayah perkotaan Palangka Raya mencakup 3 Taman Kanak-Kanak (TK), 9 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu titik peluncuran awal berada di SDN 1 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya yang melayani 412 siswa (BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2025).

Namun, terdapat jurang pemisah yang lebar antara target perencanaan pusat dengan realisasi riil di lapangan. Dari total target kumulatif yang dipatok untuk menjangkau kurang lebih 700.000 jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah, realisasi serapan pelayanan program tercatat masih berada di bawah 50 persen atau baru berhasil menjangkau sekitar 200.000-an sasaran. Hambatan serapan ini utamanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah unit dapur produksi di tingkat bawah akibat kendala biaya logistik dan aksesibilitas wilayah.

Akibatnya, wacana mengenai pembatasan kuota atau moratorium unit dapur per kecamatan justru dinilai kurang kontekstual bagi kondisi riil Kalimantan Tengah yang secara objektif justru membutuhkan akselerasi penambahan unit SPPG baru demi mengejar sisa target kuota yang belum terpenuhi (Dhani & Maullana, 2026).

Berdasarkan basis data makro terbaru, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kisaran 2,77 juta jiwa, yang terdiri atas 1,44 juta jiwa penduduk laki-laki dan 1,33 juta jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk makro provinsi masih berada pada angka yang rendah, yaitu sekitar 18 hingga 19 jiwa per kilometer persegi, menempatkannya jauh di bawah rata-rata kepadatan penduduk nasional. Pola sebaran penduduk menunjukkan konsentrasi spasial yang tidak merata. Wilayah perkotaan dan kawasan pesisir bagian selatan menjadi pusat pertumbuhan populasi, sementara wilayah pedalaman bagian tengah dan utara memiliki tingkat kepadatan yang jauh lebih renggang (BPS Kalimantan Tengah, 2026).

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan karakteristik struktur penduduk usia muda menuju dewasa, dengan dominasi yang kuat pada kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang berada di kisaran 68 persen. Tingginya proporsi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Tengah berada pada fase transisi demografis yang krusial. Dari perspektif pendidikan formal, terjadi peningkatan partisipasi pencapaian pendidikan menengah dalam dua dekade terakhir, meskipun disparitas kualitas dan akses fasilitas pendidikan masih terlihat cukup jelas antara pusat perkotaan dan wilayah kecamatan terpencil di

pedalaman. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kapasitas kualitas sumber daya manusia lokal (BPS Kalimantan Tengah, 2026).

Struktur ekonomi berbasis sektor primer juga memengaruhi dinamika penerimaan kebijakan. Rumah tangga yang bergantung pada pendapatan musiman cenderung lebih sensitif terhadap program bantuan sosial dan intervensi kesejahteraan. Dalam konteks ini, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipersepsikan sebagai kebijakan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan ekonomi tidak langsung bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Secara lebih spesifik, lambatnya pemerataan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan di Kalimantan Tengah berakar pada empat kendala infrastruktur utama. Pertama, keterbatasan aksesibilitas wilayah yang membuat jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi belum menjangkau seluruh daerah secara utuh. Kedua, kurangnya perhatian terhadap penyediaan infrastruktur penunjang sektor pertanian, padahal sektor ini merupakan andil terbesar perekonomian daerah. Berlanjut pada poin ketiga, persebaran penduduk yang timpang akibat belum terpenuhinya standar kelayakan fasilitas kehidupan dasar di luar perkotaan. Serta keempat, rendahnya kuantitas dan kualitas jalur penghubung antar-daerah yang memperberat isolasi wilayah pedesaan di pedalaman. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan hunian yang layak serta sarana pendukung kehidupan yang efisien bagi masyarakat ekonomi lemah di perdesaan masih memerlukan pembenahan jangka panjang yang berkelanjutan (Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, 2017).

2.2. Kondisi Sosial Ekonomi sebagai Konteks Implementasi Kebijakan di Kalimantan Tengah

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah membentuk latar struktural yang sangat menentukan efektivitas, jangkauan, dan keberhasilan implementasi kebijakan publik di daerah, termasuk dalam program jaminan sosial seperti Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan agregat indikator makro ekonomi daerah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) provinsi ini mencatat performa ekonomi yang kuat, di mana capaian perekonomian makronya tumbuh positif sebesar 4,80 persen. Secara rata-rata, capaian PDRB nominal per kapita masyarakat Kalimantan Tengah menyentuh angka Rp84,7 juta per tahun (BPS Kalimantan Tengah, 2026).

Meskipun pendapatan per kapita daerah secara agregat mencatatkan angka yang cukup tinggi, distribusi realitas ekonomi di lapangan menunjukkan adanya variasi spasial dan disparitas kesejahteraan yang cukup besar antarkabupaten. Sektor domestik regional didominasi secara kuat oleh aktivitas industri ekstraktif korporasi skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta pengolahan kayu kehutanan. Struktur ekonomi yang condong pada padat modal dan sumber daya alam ini melahirkan pola pemisahan ekonomi (*economic dualism*). Kabupaten dengan basis komoditas perkebunan dan pertambangan yang kuat seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Murung Raya mencatatkan nilai pendapatan per kapita nominal yang melambung tinggi. Sebaliknya, wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian rakyat hulu tradisional

seperti Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau mempunyai basis kapasitas PDRB per kapita yang jauh lebih rendah (BPS Kalimantan Tengah, 2025).

Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tecermin pula pada peta kemiskinan makro daerah. Persentase jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah secara umum berada pada level yang terkendali, yakni sebesar 4,94 persen dari total populasi. Angka kemiskinan ini menempatkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan makro yang berada di bawah rata-rata persentase nasional. Walau demikian, data sektoral BPS menunjukkan bahwa kantong kemiskinan provinsi masih didominasi oleh masyarakat perdesaan di pedalaman hulu dengan tingkat persentase mencapai 5,02 persen, berbanding terbalik dengan kawasan perkotaan yang hanya mencatat angka 4,84 persen (BPS Kalimantan Tengah, 2025).

Berdasarkan batas kecukupan finansial minimum, Garis Kemiskinan (GK) makro Kalimantan Tengah ditetapkan berada pada angka Rp654.066 per kapita per bulan. Rata-rata alokasi anggaran rumah tangga yang dihabiskan untuk sektor makanan dasar yang cukup tinggi ini memperlihatkan rentannya ketahanan pangan keluarga prasejahtera terhadap guncangan fluktuasi harga komoditas pangan eceran di pasar lokal. Dari dimensi modal manusia, kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah berada dalam tren perbaikan berkelanjutan yang ditandai oleh perolehan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,86. Nilai capaian ini menempatkan status pembangunan manusia di Kalimantan Tengah masuk ke dalam Kategori Tinggi. Namun, angka komposit IPM ini menyisakan tantangan berupa kesenjangan akses pemenuhan fasilitas dasar (BPS Kalimantan Tengah, 2025).

Di pusat administrasi seperti Kota Palangka Raya, standar kelayakan hidup, ketersediaan fasilitas layanan kesehatan anak, dan akses pendidikan menengah tersedia secara merata. Sebaliknya, pada wilayah pedalaman hulu sungai, keterbatasan rantai pasok logistik bahan pangan pokok serta minimnya sarana infrastruktur sanitasi yang sehat masih menjadi hambatan utama masyarakat lokal (BPS Kalimantan Tengah, 2025).

Kombinasi antara karakteristik struktur ekonomi daerah yang berbasis komoditas primer, tantangan biaya logistik akibat hambatan geografis wilayah daratan yang luas, serta pola sebaran konsumsi pangan masyarakat berpenghasilan rendah ini melahirkan implikasi yang signifikan terhadap rancangan program Makan Bergizi Gratis. Di satu sisi, besarnya porsi anggaran rumah tangga prasejahtera yang habis untuk pemenuhan konsumsi makanan dasar mengindikasikan bahwa program intervensi gizi nasional ini akan memberikan dampak bantuan langsung yang signifikan bagi penghematan pengeluaran keluarga miskin di perdesaan.

Namun di sisi lain, kondisi disparitas wilayah hulu-hilir, adanya ketimpangan rantai pasokan bahan baku pangan antar-kabupaten, serta rendahnya akses keterjangkauan transportasi di wilayah pedalaman perbukitan utara menjadi tantangan operasional logistik yang sangat berat bagi jajaran birokrasi daerah dalam menjamin pemerataan standar mutu makanan yang didistribusikan. Karakteristik topografi wilayah yang membelah oleh belasan sungai besar serta renggangnya kepadatan penduduk di sektor hulu, sebagaimana telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, berpotensi mengeskalasi bias perkotaan (*urban bias*) jika tidak

diantisipasi melalui sensitivitas skala kebijakan. Oleh karena itu, pemetaan dimensi ekonomi, sosial makro, serta bentang demografi dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi krusial sebagai pisau analisis dalam mengevaluasi bagaimana dinamika struktural tersebut membentuk ragam respons afektif serta akuntabilitas kelembagaan lokal dalam mengawal kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah.